

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Keagenan

Teori keagenan (*agency theory*) sering digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian mengenai *corporate governance*. Teori keagenan merupakan dasar yang digunakan perusahaan untuk memahami *corporate governance* (Rini, 2010). Teori ini membahas hubungan antara prinsipal (pemilik dan pemegang saham) dan agen (manajemen). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan muncul ketika satu atau lebih individu (*principal*) mempekerjakan individu lain (*agen*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan kekuasaan kepada agen untuk membuat suatu keputusan atas nama prinsipal tersebut.

Prinsipal akan menyediakan fasilitas dan dana untuk menjalankan perusahaan serta mendelegasikan kebijakan pembuatan keputusan kepada agen. Prinsipal memiliki harapan bahwa agen akan menghasilkan return dari uang yang mereka investasikan. Di lain pihak, agen memiliki kewajiban untuk mengelola perusahaan sesuai dengan keinginan prinsipal. Sebagai wujud dari akuntabilitas manajemen kepada pemilik, setiap periode manajemen memberikan laporan mengenai informasi perusahaan kepada pemiliknya.

Teori keagenan mengasumsikan bahwa masing-masing individu cenderung untuk mementingkan diri sendiri (Rini,2010). Manajer sebuah perusahaan mungkin memiliki tujuan-tujuan pribadi yang bersaing dengan tujuan untuk memaksimalkan kekayaan pemilik pemegang saham. Hak yang dimiliki manajer untuk mengelola aset perusahaan, menimbulkan adanya konflik kepentingan antara dua kelompok. Teori keagenan mengasumsikan, dalam pasar modal dan tenaga kerja yang tidak sempurna, manajer akan berusaha untuk memaksimalkan *utilitas* mereka sendiri, dengan mengorbankan kepentingan para pemegang saham (Hikmah dkk, 2011).

Agen memiliki kemampuan untuk beroperasi dengan kepentingan mereka sendiri daripada kepentingan terbaik perusahaan disebabkan oleh informasi yang bersifat asimetris. Konflik antara agen dan prinsipal dapat diminimalisasi dengan berbagai cara, salah satunya adalah melalui pengungkapan informasi oleh manajemen (agen). Disamping untuk mengurangi asimetri informasi, juga sebagai bentuk pertanggungjawaban oleh manajemen. Sejalan dengan berkembangnya isu mengenai *corporate governance* yang didalamnya terdapat prinsip transparansi dan akuntabilitas, akan meningkatkan perhatian terhadap masalah pengungkapan pada aspek *corporate governance* suatu perusahaan (Hikmah dkk, 2011).

## 2. Corporate Governance

Dalam penelitian Isgiyarta dan Tristiarini (2005), *Malaysian High Level Finance Committee on Corporate Governance* mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-urusan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan pihak-pihak lain.

Sementara di Indonesia untuk dapat menerapkan *good corporate governance* dalam perusahaan, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKKG) mengeluarkan asas-asas dalam pedoman umum *good corporate governance* Indonesia tahun 2006 yang dijabarkan sebagai berikut:

### 1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya

### 2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan

3. *Responsibilitas (Responsibility)*

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. *Independensi (Independency)*

Untuk melancarkan pelaksanaan asas *good corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain

5. *Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)*

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan

**3. Bank dan *Corporate Governance* Perusahaan Perbankan di Indonesia**

Bank adalah lembaga intermediasi yang dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada dana masyarakat dan kepercayaan baik

dari dalam maupun luar negeri. Dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak lepas dari bidang keuangan dan juga menghadapi berbagai risiko, baik risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, maupun risiko operasi banyaknya ketentuan yang mengatur sektor perbankan dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat, termasuk ketentuan yang mengatur kewajiban untuk memenuhi modal minimum sesuai dengan kondisi masing-masing bank, yang menjadikan sektor perbankan sebagai sektor yang "*highly regulated*".

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, definisi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan definisi tersebut, kegiatan bank fokus terhadap tiga hal, yaitu:

1. Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*)
2. Menyalurkan dana ke masyarakat (*lending*)
3. Memberikan jasa-jasa perkreditan (*services*)

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, jenis bank dibedakan berdasarkan:

1. Dilihat dari fungsinya, bank terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat
2. Dilihat dari segi kepemilikannya, bank terdiri dari bank milik pemerintah, milik swasta nasional, milik asing, dan milik campuran

3. Dilihat dari segi status, terdiri dari bank devisa dan non devisa
4. Dilihat dari segi cara menentukan harga, terdiri dari bank konvensional dan bank syariah.

Sektor perbankan sangat erat kaitannya dengan *good corporate governance* karena adanya regulasi dari BAPEPAM tentang penyampaian laporan tahunan yang memuat laporan tata kelola perusahaan, sesuai Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 yang disempurnakan dengan PBI No.8/14/2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia No.9/12/DPNP/2007 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum. Bank diwajibkan untuk menyajikan informasi kepada *stakeholder* tentang pelaksanaan *good corporate governance* dan kesimpulan umum hasil *self assesment* pelaksanaan *good corporate governance*, sehingga pengungkapan *corporate governance* menjadi sangat penting. industri perbankan adalah industri yang berbasis kepercayaan. Untuk meningkatkan kepercayaan investor tentunya bank perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya. Salah satunya adalah dengan pengungkapan *corporate governance*.

#### **4. Luas Pengungkapan *Corporate Governance* dalam Laporan Tahunan Perusahaan**

Laporan tahunan merupakan sumber utama dalam melakukan penelitian mengenai pengungkapan *corporate governance*. Hal ini dikarenakan laporan tahunan berisi tentang berbagai macam informasi mengenai perusahaan termasuk praktik *good corporate governance*. Karim

*et al.* dalam Bhuiyan dan Biswas (2007) berpendapat bahwa laporan tahunan harus dipertimbangkan sebagai sumber informasi paling penting mengenai perusahaan. Selain itu, Bushman dan Smith dalam Bhuiyan dan Biswas (2007) berpendapat bahwa tujuan yang mendasari adanya penelitian mengenai *corporate governance* dalam akuntansi adalah untuk menyediakan bukti sejauh mana informasi yang diberikan dalam sistem akuntansi dapat mengurangi masalah keagenan

Dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia tahun 2006 bab VII mengenai pernyataan tentang penerapan pedoman *good corporate governance* dalam prinsip dasarnya dinyatakan bahwa: “*Setiap perusahaan harus membuat pernyataan tentang kesesuaian penerapan good corporate governance dengan Pedoman Good Corporate Governance ini dalam laporan tahunannya. Pernyataan tersebut harus disertai informasi penting lain yang berkaitan dengan penerapan good corporate governance. Dengan demikian, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk regulator, dapat menilai sejauh mana Pedoman Good Corporate Governance pada perusahaan tersebut telah diterapkan.*”

Bhuiyan dan Biswas (2007) mengidentifikasi sebanyak 45 item pengungkapan untuk mendeteksi adanya pengungkapan *corporate governance* di Bangladesh. *Item-item* tersebut diperoleh dari *Guidance on Good Practices in Corporate Governance Disclosure* yang dikeluarkan oleh *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD).

Dalam UNCTAD, dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pengungkapan informasi keuangan dan pengungkapan informasi non keuangan. Pengungkapan pada informasi keuangan terdiri dari sembilan *item* pengungkapan, sedangkan pengungkapan informasi non keuangan sejumlah 36 *item* pengungkapan.

Karena terdapat ketidakrelevanan beberapa *item* pengungkapan yang dikeluarkan oleh UNCTAD dengan kondisi perusahaan di Indonesia (Hikmah dkk, 2011), maka penelitian ini tidak menggunakan *item* pengungkapan tersebut. Item-item pengungkapan yang digunakan berupa item yang diwajibkan dalam Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan Nomor KEP/134/BL/2006 Peraturan X.K.6. Selain *item* yang diwajibkan oleh BAPEPAM, penelitian ini juga menggunakan *item-item* yang diperoleh dari Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).

Berdasarkan peraturan dan pedoman tersebut, diperoleh sebanyak 16 poin item yang terdiri dari pemegang saham; dewan komisaris; dewan direksi; komite audit; komite nominasi dan remunerasi; komite manajemen risiko; komite-komite lain yang dimiliki perusahaan; sekretaris perusahaan; pelaksanaan pengawasan dan pengendalian internal; manajemen risiko perusahaan; perkara penting yang dihadapi oleh perusahaan, anggota dewan direksi, dan anggota dewan komisaris; akses informasi dan data perusahaan; etika perusahaan; tanggung jawab sosial;

pernyataan penerapan *good corporate governance*; dan informasi penting lainnya yang berkaitan dengan penerapan *good corporate governance*. Enam belas point item tersebut memuat 103 item pengungkapan yang digunakan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah mengungkapkan informasi mengenai *corporate governance*.

## **B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan *Corporate Governance* dalam laporan Tahunan Perusahaan**

### **1. Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan menggambarkan besar atau kecilnya sebuah perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diproksikan dengan aktiva, jumlah karyawan, kapitalisasi pasar, dan lain sebagainya (Pramono, 2011). Umumnya pada perusahaan besar akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak dibanding dengan perusahaan kecil (Rini, 2010). Pada perusahaan besar biasanya didorong untuk mengungkapkan informasi lebih lanjut di halaman *web* mereka dalam pemasaran surat berharga untuk mencapai tujuan mereka. Perusahaan besar mungkin lebih mampu mengakses pasar keuangan jika mereka mengungkapkan informasi secara *online* (Hikmah dkk, 2011).

### **2. Umur *Listing***

Menurut Yularto dan Chariri (2003), umur perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan dapat tetap bertahan atau eksis, mampu bersaing, dan memanfaatkan peluang bisnis dalam suatu perekonomian. Perusahaan yang memiliki umur lebih tua mungkin akan meningkatkan

praktik pengungkapan dari waktu ke waktu. Hal ini dikarenakan perusahaan yang lebih tua dianggap telah memiliki lebih banyak pengalaman dalam pengungkapan laporan tahunannya. Perusahaan yang telah memiliki pengalaman lebih banyak akan lebih memahami kebutuhan penggunanya dan informasi yang lebih detail mengenai perusahaan yang harus dibuka kepada pihak-pihak di luar manajemen yang berkepentingan terhadap perusahaan.

### 3. Kepemilikan Dispersi

Masalah *corporate governance* muncul sebagai akibat adanya perbedaan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan. Perbedaan tersebut dapat dikaitkan dengan struktur kepemilikan yang ada dalam perusahaan (Hikmah dkk, 2011).

Haniffa and Cooke 2005 dalam Kusumawati (2007) mengklasifikasikan struktur kepemilikan saham menjadi dua, yaitu kepemilikan terkonsentrasi (*concentrated ownership*) dan kepemilikan dispersi (*dispersed ownership*). Kepemilikan terkonsentrasi adalah kepemilikan mayoritas saham oleh pihak manajerial. Sedangkan menurut Alsaeed (2006), kepemilikan dispersi diwakili oleh persentase saham yang dimiliki oleh investor individu di luar manajemen selain pemerintah, institusi nasional dan asing, serta kalangan keluarga.

Dalam teori agensi, dinyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat kepemilikan dispersi yang tinggi akan melakukan pengungkapan yang tinggi pula (Rini, 2010). Hal ini terjadi karena dengan adanya kepemilikan

dispersi, pemilik akan meminta pengungkapan lebih untuk mengawasi perilaku *oportunistik* manajemen dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki kepemilikan terkonsentrasi (Rini, 2010). Semakin terdispersinya kepemilikan saham maka semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan. Tuntutan publik atas transparansi perusahaan untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas dalam laporan tahunan juga semakin besar dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki kepemilikan terkonsentrasi (Hikmah dkk, 2011)

#### 4. Tingkat Profitabilitas

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapat laba melalui semua kemampuan, dan sumber daya yang ada (Hikmah dkk, 2011) mengidentifikasi *profit margin* dan *earning return* sebagai variabel yang berhubungan secara positif dalam variasi yang ditentukan dalam luas pengungkapan perusahaan dengan alasan *earning* yang lebih tinggi memotivasi manajemen untuk menyajikan informasi yang lebih banyak. Manajer ingin meyakinkan kepada pemilik atau investor tentang profitabilitas yang dicapai perusahaan agar mereka meningkatkan kompensasi untuk manajemen, untuk itu pihak manajemen melakukan pengungkapan yang lebih luas (Hikmah dkk, 2011).

Semakin bertambahnya sumber pendanaan yang didapat dari pemegang saham, kreditur, serta pemangku kepentingan lainnya, maka perusahaan akan semakin mempunyai kesempatan dalam mengembangkan

aktivitas perusahaan sehingga perusahaan akan cenderung dapat meningkatkan labanya (Pramono, 2011)

#### **5. Ukuran Dewan Komisaris**

Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris yang dimiliki oleh perusahaan, terdiri dari komisaris utama, komisaris independen, dan komisaris. Kedudukan masing-masing anggota dewan komisaris, termasuk komisaris utama adalah setara. Pada teori agensi, dewan komisaris dibutuhkan untuk memonitor dan mengendalikan tindakan manajer karena perilaku oportunistanya Jensen dan Mecking dalam Hikmah dkk (2011). Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada dewan direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance* (KNKG, 2006). Akan tetapi, dewan komisaris tidak diperbolehkan untuk ikut serta dalam mengambil keputusan operasional. Coller dan Gregory dalam Hadi dan Sabeni (2002) berpendapat bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan manajemen dan *monitoring* yang dilakukan akan semakin efektif.

#### **6. Kualitas Audit**

Teori reputasi memprediksikan adanya hubungan positif antara kualitas audit dengan ukuran KAP (Lennox, 2000 dalam Fitriani, 2001) dimana jika ukuran KAP besar maka akan menghasilkan audit yang lebih berkualitas. Ukuran KAP yang lebih besar dapat menyelesaikan tugasnya

lebih baik karena memiliki ukuran yang lebih besar, sumber daya manusia yang mencukupi serta kecenderungan untuk mempertahankan reputasinya (Francis dkk, 1999 dalam Fitriani, 2001).

Auditor dapat berfungsi sebagai agen pemantauan yang memberikan sinyal kepada pasar bahwa informasi yang diberikan oleh perusahaan memiliki kredibilitas yang tinggi dan lebih informatif (Titman dan Truman, 1986 dalam Yularto dan Chariri, 2003).

Meningkatkan kredibilitas dari laporan keuangannya, perusahaan menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mempunyai reputasi atau nama baik. Hal ini biasanya ditunjukkan dengan kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan kantor akuntan publik besar yang berlaku universal yang dikenal dengan *Big Four Worldwide Accounting Firm (Big 4)*. Kim dkk (2007) dalam Nursetyorini dan Muid (2010) menunjukkan bahwa bank-bank di Amerika Serikat lebih bereaksi positif terhadap perusahaan yang diaudit oleh KAP *big-4*. Bank-bank memberikan tarif yang lebih rendah pada perusahaan yang diaudit oleh KAP *big-4* dibandingkan perusahaan yang diaudit KAP *non-big-4*. Kim dkk (2007) dalam Nursetyorini dan Muid (2010) juga memberikan bukti langsung bahwa bank memperhitungkan kualitas audit ketika menilai *default risk* dan *cost of loan* perusahaan.

### **C. Hasil Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis**

#### **1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Governance* dalam laporan Tahunan Perusahaan**

Beberapa penelitian terdahulu yang menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap luas pengungkapan menunjukkan hasil empiris yang berbeda. Penelitian oleh Wallace, Zarzeki, Suripto, Darmawati, Marwata, Gunawan, dan Komalasari (dalam Murni, 2004) menemukan bukti empiris bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan. Sementara Multanto dan Elvina (2005) serta Almilia dan Retrinasari (2007) menemukan hal yang sebaliknya.

Dalam teori agensi, apabila ukuran perusahaan lebih besar, maka biaya keagenan yang dikeluarkan juga lebih besar. Jadi untuk mengurangi biaya keagenan tersebut, perusahaan akan cenderung mengungkapkan informasi yang lebih luas (Waryanto, 2010). Perusahaan kecil umumnya berada pada situasi persaingan yang ketat dengan perusahaan lain. Mengungkapkan terlalu banyak tentang jati dirinya kepada pihak eksternal dapat membahayakan posisinya dalam persaingan, sehingga perusahaan kecil cenderung untuk tidak melakukan pengungkapan selengkap perusahaan besar (Singhvi dan Desai; Buzby dalam Rini, 2010). Asumsi tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mujiyono (2004), dan Amalia (2005) yang menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin luas

pengungkapan informasi. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Ukuran Perusahaan memiliki probabilitas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *good governance* dalam laporan tahunan perusahaan.

## **2. Pengaruh Umur *Listing* terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Governance* dalam laporan Tahunan Perusahaan**

Yularto dan Chariri (2003) berpendapat bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan. Perusahaan yang sudah berdiri lebih lama diasumsikan telah memiliki banyak *stakeholders*. Hal ini menyebabkan perusahaan mengungkapkan informasi seluas-luasnya sebagai wujud dari tanggung jawab perusahaan kepada *stakeholders*. Di sisi lain, *stakeholders* juga menuntut perusahaan untuk mengungkapkan informasi secara detail agar dapat digunakan untuk mengetahui kondisi perusahaan sebenarnya. Penelitian Marwata (2000), Yularto dan Chariri (2003) serta Simanjatak dan Widiastuti (2004) juga membuktikan bahwa umur listing berpengaruh terhadap luas pengungkapan *Corporate Governance*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Umur *Listing* memiliki probabilitas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *good governance* dalam laporan tahunan perusahaan.

### 3. Pengaruh Kepemilikan Dispersi terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Governance* dalam laporan Tahunan Perusahaan

Persoalan *corporate governance* muncul akibat adanya perbedaan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan. Perbedaan tersebut terkait dengan struktur kepemilikan yang ada dalam perusahaan. Struktur kepemilikan dalam perusahaan dapat dikelompokkan menjadi struktur kepemilikan terkonsentrasi dan menyebar (dispersi). Perusahaan yang memiliki struktur kepemilikan tersebar cenderung memiliki pemangku kepentingan dengan jumlah lebih besar dan memiliki tingkat keragaman yang lebih tinggi dibanding perusahaan yang memiliki struktur terpusat (Pramono, 2011). Untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan akan informasi, khususnya informasi *corporate governance*, perusahaan akan cenderung mengungkapkan informasi *corporate governance* lebih luas. Hal ini juga didukung oleh teori agensi yang menyatakan bahwa pengungkapan akan lebih luas pada perusahaan yang struktur kepemilikannya lebih menyebar (Haniffa dan Cooke, 2002 dalam Kusumawati, 2006). Penelitian Hadi dan Sabeni (2002), Darwanti (2006), Hikmah, dkk (2011) menemukan bahwa kepemilikan disperse berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Sementara penelitian Marwata (2000) menemukan hal yang sebaliknya. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Kepemilikan Dispersi memiliki probabilitas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *good governance* dalam laporan tahunan perusahaan.

#### **4. Pengaruh Profitabilitas terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Governance* dalam laporan Tahunan Perusahaan**

Profitabilitas yang tinggi menunjukkan tingginya laba yang diperoleh oleh perusahaan. Dengan profitabilitas yang tinggi manajer perusahaan akan mengungkapkan lebih banyak laporan keuangan untuk menunjukkan kinerja dari perusahaan (Kartika, A., 2009). Hal ini sependapat dengan Saputri (2010) yang menyatakan bahwa Perusahaan yang memiliki *good news* dapat ditandai dengan perolehan laba tinggi maupun profitabilitas tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi tambahan yang bersifat *non-mandatory* guna menunjukkan kinerja perusahaan yang baik. Muhamad *et al.* (2009) juga menyatakan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi lebih cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi. Informasi ini digunakan untuk mendukung kelangsungan posisi perusahaan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2010) menemukan profitabilitas (ROA) berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Informasi ini mendukung hipotesis teori sinyal, yang menyatakan bahwa perusahaan dengan informasi perusahaan yang bagus (*good news*) lebih mungkin untuk mengungkapkan informasi

tambahan (Ross, 1979 dalam Saputri, 2010). Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>4</sub>: Profitabilitas memiliki probabilitas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *good governance* dalam laporan tahunan perusahaan.

#### **5. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Governance* dalam laporan Tahunan Perusahaan**

Dewan komisaris bertugas mengawasi kinerja dewan direksi. Coller dan Gregory dalam Hadi dan Sabeni (2002) berpendapat bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan manajemen dan *monitoring* yang dilakukan akan semakin efektif. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Ting dan Huang (2009) yang mendukung hipotesis *alignment* yang menunjukkan bahwa semakin tinggi *inside directors* pada dewan menunjukkan dampak positif pada kinerja perusahaan ketika dewan didominasi oleh *inside directors* atau ketika *inside directors* adalah *blockholders*. Oleh karena itu, pengawasan kepada manajemen perusahaan juga akan tinggi maka pengungkapan yang dilakukan pihak manajemen juga akan semakin luas.

Penelitian yang menunjukkan adanya hubungan yang positif antara ukuran dewan komisaris dengan tingkat pengungkapan informasi strategis perusahaan antara lain adalah penelitian yang dilakukan Pearce dan Zahra (1992) dan Dalton et al. (1999) dalam (Sanchez, Dominguez, dan Alvarez, 2010) menemukan bahwa ukuran Dewan berhubungan positif dengan proses untuk perencanaan strategi baru. Dalam hal ini, semakin tinggi ukuran Dewan

semakin tinggi volume informasi strategis yang diungkapkan untuk menunjukkan usaha mereka yang signifikan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>5</sub>: Ukuran Dewan Komisaris memiliki probabilitas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *good governance* dalam laporan tahunan perusahaan

#### **6. Pengaruh Kualitas Audit terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Governance* dalam laporan Tahunan Perusahaan**

Penelitian yang dilakukan oleh Mayangsari (2003) menyatakan bahwa spesialisasi industri audit mempunyai pengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Laporan keuangan yang baik harus memenuhi prinsip "*disclousure*" yaitu salah satu komponen dari penerapan *Good Corporate Governance* yang berkualitas pada perusahaan. Penelitian lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Hormati (2009) membuktikan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh positif terhadap penerapan *Corporate Governance*. Serta penelitian yang dilakukan oleh Ulum (2007) bahwa kualitas audit memiliki pengaruh terhadap kualitas implemtasi *Good Corporate Governance*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>6</sub>: Kualitas Audit memiliki probabilitas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *good governance* dalam laporan tahunan perusahaan.